

LITERATUR REVIEW ENTITAS KONSOLIDASI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DALAM PERSPEKTIF STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Oleh:

Ahmad Azka Nur Mustafidan¹

Rejoz Yoel Graceson Sumonda²

Yulindar Fahri Anfasya³

Endang Kartini Panggiarti⁴

Universitas Tidar

Alamat: JL. Kapten Suparman No.39, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah (56116).

Korespondensi Penulis: ahmad.azka_nm@students.untidar.ac.id,
rejozgraceson@students.untidar.ac.id, yulindar.fahri.anfasya@students.untidar.ac.id,
endangkartini@untidar.ac.id.

Abstract. Consolidated Financial Statements (CFS) serve as the fundamental representation of a business group's true economic substance, making them vital instruments for informed stakeholder decision-making. This study aims to conduct a critical review of the concept of consolidated entities and the preparation of CFS within the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) framework (PSAK 4, 22, 65, 110), analyzing the critical challenges of IFRS convergence, and investigating the persistent risk to data integrity. The methodology employed is a Systematic Literature Review (SLR) utilizing a Critical Narrative Synthesis technique on four selected relevant primary literatures. Findings indicate that the integrated implementation of PSAK 15, PSAK 22, and PSAK 65 substantially enhances the transparency and accountability of CFS, fully aligning with the Entity Theory. However, CFS remain vulnerable to inconsistencies stemming from PSAK 22 convergence disparities (particularly in fair value measurement and Non-Controlling Interest (NCI) presentation) and the far more

LITERATUR REVIEW ENTITAS KONSOLIDASI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DALAM PERSPEKTIF STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

serious threat of financial statement manipulation (overstatement revenue). These empirical breaches fundamentally prove the existence of agency problems and a failure in the faithful representation function. The implications of these findings are urgent: technical compliance alone is insufficient; it is imperative to implement stronger external supervisory and audit systems and impose deterrent sanctions by regulators. This recommendation is crucial for safeguarding the credibility and stability of the capital market against systemic losses caused by deliberate financial engineering.

Keywords: Accountability, Consolidated Entities, Financial Manipulation, PSAK.

Abstrak. Laporan keuangan konsolidasian (LKK) adalah representasi fundamental yang menyajikan substansi ekonomi sejati dari sebuah kelompok usaha, menjadikannya instrumen vital bagi pengambilan keputusan *stakeholder*. Kajian ini bertujuan melakukan peninjauan kritis terhadap konsep entitas konsolidasi dan penyusunan LKK dalam kerangka Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia (PSAK 4, 22, 65, 110), menganalisis tantangan adopsi IFRS, dan menelisik risiko integritas data. Metode yang digunakan adalah Kajian Pustaka Sistematis (*Systematic Literature Review*) dengan teknik Sintesis Naratif Kritis terhadap empat literatur primer terpilih yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa implementasi terintegrasi PSAK 15, PSAK 22, dan PSAK 65 secara substansial mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LKK, sejalan dengan Teori Entitas. Namun, LKK rentan terhadap inkonsistensi yang timbul dari disparitas konvergensi PSAK 22 (terutama dalam pengukuran nilai wajar dan penyajian NCI) dan ancaman yang lebih serius dari manipulasi laporan keuangan (*overstatement revenue*), yang membuktikan adanya *agency problem* dan kegagalan fungsi *faithful representation*. Implikasi dari temuan ini sangat mendesak: tidak cukup hanya kepatuhan teknis, melainkan diperlukan penguatan sistem pengawasan dan audit eksternal serta penjatuhan sanksi yang bersifat deteren oleh regulator. Rekomendasi ini krusial untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas pasar modal dari kerugian sistemik akibat rekayasa keuangan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Entitas Konsolidasi, Manipulasi Keuangan, PSAK.

LATAR BELAKANG

Kompleksitas struktur korporasi global, yang ditandai oleh intensifikasi strategi kombinasi bisnis, menempatkan laporan keuangan konsolidasian (LKK) sebagai mandat fundamental untuk merefleksikan substansi ekonomi sejati dari sebuah kelompok usaha. LKK, oleh karena itu, merupakan instrumen krusial bagi investor, kreditor, dan regulator dalam proses pengambilan keputusan. Akurasi, transparansi, dan daya banding LKK bergantung erat pada kepatuhan rigid terhadap Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, khususnya PSAK 65 (LKK), PSAK 22 (Kombinasi Bisnis), dan PSAK 4 (Laporan Keuangan Tersendiri), yang mendefinisikan kriteria kendali (*control*) sebagai basis konsolidasi. Namun, implementasi standar tersebut terus diuji oleh kompleksitas teknis seperti eliminasi transaksi antar-entitas, serta tantangan konvergensi IFRS yang menciptakan disparitas dalam penyajian *kepentingan non-pengendali* dan pengukuran nilai wajar aset. Lebih jauh, dan secara etis paling mengancam, integritas LKK rentan terhadap manipulasi, dibuktikan oleh studi kasus empiris yang mengungkap praktik *overstatement revenue* dan transaksi fiktif, yang secara eksplisit menuntut pengawasan dan sanksi yang lebih keras guna mencegah erosi kepercayaan pasar. Mengingat persimpangan antara tuntutan kepatuhan, tantangan teknis adopsi IFRS, dan risiko etika yang mengancam kredibilitas, *literature review* ini dijustifikasi untuk secara kritis menyintesiskan kerangka PSAK dengan realitas praktik, serta menyediakan perspektif holistik mengenai integritas dan akuntabilitas LKK dalam konteks akuntansi Indonesia yang dinamis.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Entitas Konsolidasi dan Paradigma Teori Entitas

Entitas konsolidasi dipahami bukan sekadar agregasi data, melainkan sebagai sebuah kesatuan ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya entitas induk dan entitas anak beroperasi di bawah satu pengendalian tunggal. Konsep ini secara filosofis mendasari penyusunan LKK, di mana kepentingan mayoritas dan minoritas diakui sebagai bagian dari entitas ekonomi yang sama, menghilangkan batas hukum formal antara entitas-entitas tersebut demi menyajikan substansi ekonomi yang sesungguhnya. Secara teoretis, konsep ini selaras dengan Teori Entitas (Entity Theory), yang

LITERATUR REVIEW ENTITAS KONSOLIDASI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DALAM PERSPEKTIF STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

menekankan bahwa fokus pelaporan adalah kelompok usaha secara keseluruhan, dan laporan keuangan ditujukan untuk semua penyedia modal, baik pemegang saham mayoritas (induk) maupun kepentingan non-pengendali (*Non-Controlling Interest/NCI*) (minoritas). Dalam konteks ini, NCI disajikan dalam ekuitas di LKK, sebuah pergeseran paradigma yang secara fundamental meningkatkan akuntabilitas laporan terhadap seluruh *stakeholder* modal.

Kerangka Regulasi Fundamental: Trias PSAK Konsolidasi

Pelaporan LKK di Indonesia diatur secara ketat oleh trias standar utama yang saling berinteraksi:

1. PSAK 65 (Laporan Keuangan Konsolidasian)

PSAK 65 (Revisi 2014, adopsi IFRS 10) menetapkan prinsip kunci, yaitu pengendalian (*control*), sebagai satu-satunya kriteria untuk konsolidasi. Pengendalian didefinisikan secara kritis, mencakup tidak hanya kepemilikan mayoritas, tetapi juga hak yang ada saat ini yang memberikan kemampuan praktis kepada entitas induk untuk mengarahkan aktivitas relevan entitas anak. PSAK 65 menuntut LKK disajikan seolah-olah seluruh kelompok usaha adalah entitas tunggal, yang memerlukan eliminasi 100% saldo, pendapatan, dan beban dari transaksi antar-entitas, sebuah proses yang krusial untuk mencegah distorsi informasi.

2. PSAK 22 (Kombinasi Bisnis)

PSAK 22 (Revisi 2010, adopsi IFRS 3) menjadi standar pelengkap yang esensial, mengatur akuntansi untuk transaksi kombinasi bisnis. Prinsip metode akuisisi (*purchase method*) diwajibkan, menuntut identifikasi entitas pengakuisisi, penentuan tanggal akuisisi, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas yang diakuisisi pada nilai wajar (*fair value*), serta pengakuan *goodwill* atau *gain from a bargain purchase*. Pengukuran nilai wajar ini adalah titik kritis yang sering menimbulkan kesulitan implementasi dan potensi subjektivitas.

3. PSAK 4 dan PSAK 110 (Laporan Keuangan Tersendiri dan Entitas Investasi)

PSAK 4 mengatur pelaporan keuangan tersendiri oleh entitas induk dan entitas anak. Sementara itu, PSAK 110 (Akuntansi Entitas Investasi) menawarkan pengecualian signifikan, memungkinkan entitas investasi untuk tidak mengonsolidasikan entitas anak, melainkan mengukur investasi tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi. Pilihan penerapan PSAK ini, terutama bagi entitas yang memiliki struktur kepemilikan kompleks atau berfungsi sebagai dana investasi, harus dipertimbangkan secara matang untuk menjamin representasi yang paling relevan.

Konvergensi IFRS dan Tantangan Komparatif

Upaya Indonesia dalam konvergensi standar menghadirkan dinamika komparatif yang menuntut analisis kritis. PSAK 22, sebagai standar akuisisi, adalah titik kontak utama dengan IFRS 3. Literatur menunjukkan bahwa meskipun konvergensi telah menghilangkan banyak perbedaan mendasar, disparitas minor namun substansial masih ditemukan, terutama terkait penyajian:

1. Kepentingan Non-Pengendali (NCI): Pengakuan NCI sebagai bagian dari ekuitas total (sesuai *Entity Theory*) adalah kunci, namun metode pengukuran NCI diakui sebagai salah satu area yang memerlukan kehati-hatian dalam praktik.
2. Pengukuran Nilai Wajar: Penentuan nilai wajar atas aset teridentifikasi dan liabilitas kontinjenji pada tanggal akuisisi (*acquisition date*) merupakan wilayah yang rentan terhadap estimasi manajemen, yang jika tidak diaudit secara ketat, dapat memengaruhi jumlah *goodwill* yang diakui.

Teori Agensi dan Krisis Integritas LKK

Teori Agensi (Agency Theory) menjadi landasan untuk memahami risiko manipulasi. Teori ini memandang hubungan antara manajemen (agen) dan pemilik modal (prinsipal) sebagai hubungan yang sarat konflik kepentingan. Manajemen memiliki motif (seperti bonus, insentif pasar, atau menghindari pelanggaran *debt covenants*) untuk memanipulasi informasi keuangan demi keuntungan pribadi. Dalam konteks LKK, konflik ini memuncak, karena kerumitan struktur konsolidasi memberikan celah yang lebih besar (*loopholes*) untuk menyembunyikan kinerja buruk atau merekayasa keuntungan. Literatur terbaru secara eksplisit menyoroti bahwa teknik seperti *overstatement revenue*, pencatatan transaksi fiktif, dan penyembunyian liabilitas

LITERATUR REVIEW ENTITAS KONSOLIDASI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DALAM PERSPEKTIF STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

merupakan modus operandi manipulasi laporan keuangan konsolidasi. Fenomena ini secara tajam menegaskan bahwa kepastian hukum dan pengawasan eksternal yang kuat merupakan *cost-control mechanism* yang harus diintensifkan untuk mengatasi *agency problem* dan menjamin bahwa LKK menyajikan integritas data yang sesungguhnya..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Desain Penelitian *Literature Review* atau Kajian Pustaka Sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*). Pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi dokumen yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesiskan temuan-temuan dari penelitian-penelitian primer yang relevan dengan topik yang dikaji. Fokus utamanya adalah menyajikan analisis komprehensif dan kritis terhadap pemahaman konseptual, tantangan implementasi PSAK, dan risiko manipulasi dalam konteks LKK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data dan Lingkup Kajian

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan fokus pada literatur ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi *purposive sampling*, yaitu yang secara eksplisit membahas PSAK konsolidasi (PSAK 4, 22, 65, 110), tantangan konvergensi, dan isu integritas laporan keuangan. Rentang waktu studi dokumen yang dikaji mencakup artikel/jurnal yang relevan yang diterbitkan dalam kurun waktu 2020 hingga 2025, termasuk empat artikel inti yang menjadi referensi utama kajian ini. Lokasi penelitian ini bersifat a-temporal dan a-spatial, karena berfokus pada analisis isi kualitatif terhadap kerangka regulasi dan temuan empiris yang dipublikasikan secara nasional maupun global, yang kemudian disintesiskan menggunakan metode Sintesis Naratif Kritis.

Sintesis Kritis Implementasi Trias PSAK: Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil analisis data menegaskan bahwa pemenuhan tujuan LKK untuk memberikan gambaran keuangan yang objektif dan komprehensif (diacu dalam Nila Ayu Pratiwi, dkk.,

2023) sangat bergantung pada integrasi penerapan tiga pilar standar, yaitu PSAK 15 (Entitas Asosiasi), PSAK 22 (Kombinasi Bisnis), dan PSAK 65 (Laporan Keuangan Konsolidasian). Interpretasi atas temuan (Tabel 1, No. 1) dari Ni Putu Winda Ayuningtyas, dkk., yang menggunakan analisis kuantitatif dan tematik, menunjukkan kesesuaian (konformitas) yang kuat dengan Teori Entitas. Peningkatan signifikan pada transparansi dan akuntabilitas LKK—khususnya melalui pengungkapan yang lebih baik terhadap pengendalian dan eliminasi transaksi—berkontribusi langsung pada terpenuhinya representasi jujur atas posisi keuangan kelompok usaha secara keseluruhan. Hal ini berimplikasi bahwa LKK yang disusun berdasarkan trias PSAK tersebut memenuhi tuntutan informasi tidak hanya bagi pemegang saham pengendali, tetapi juga bagi Kepentingan Non-Pengendali (NCI), sehingga secara teoritis mengurangi *information asymmetry* yang menjadi isu sentral dalam pasar modal. Namun, bagian literatur dasar kelompok menyoroti pertentangan dalam praktik, di mana tantangan teknis seperti eliminasi transaksi dan harmonisasi kebijakan antar-entitas (Tabel 1, No. 4) sering menjadi penghambat praktis bagi pencapaian transparansi ideal, terutama pada entitas dengan struktur kepemilikan yang kompleks.

Tantangan Konvergensi IFRS dan Disparitas PSAK 22

Analisis kritis berlanjut pada isu konvergensi IFRS, yang merupakan salah satu upaya global untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan. Penelitian Cinta Nikita Aulia, dkk. (2024) secara spesifik mengulas disparitas antara penyusunan LKK di Indonesia dan standar internasional. Interpretasinya (Tabel 1, No. 2) menunjukkan bahwa meskipun PSAK 22 (sebagai adopsi IFRS 3) telah diterapkan, masih ditemukan perbedaan substansial dalam perlakuan akuntansi, yang terutama meliputi:

1. Pengukuran Nilai Wajar Aset: Penggunaan estimasi dan penilaian subjektif dalam menentukan nilai wajar pada tanggal akuisisi menciptakan potensi bias.
2. Penyajian NCI dan Liabilitas: Adanya perbedaan interpretasi dalam klasifikasi liabilitas tertentu dan penyajian NCI dapat menyebabkan perbedaan material dalam total ekuitas yang disajikan, yang secara langsung memengaruhi rasio-rasio keuangan kritis.

Temuan ini menunjukkan adanya inkonsistensi minor yang harus diatasi. Secara teoritis, disparitas ini melemahkan idealisme daya banding (*comparability*) yang menjadi

LITERATUR REVIEW ENTITAS KONSOLIDASI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DALAM PERSPEKTIF STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

janji utama dari konvergensi IFRS, menuntut profesional akuntansi untuk memiliki pemahaman ganda yang mendalam (PSAK dan IFRS) agar LKK tidak menyesatkan pengguna global.

Integritas LKK dan Ancaman Manipulasi: Perspektif Kritis

Isu integritas laporan keuangan merupakan titik kontradiksi paling tajam terhadap tujuan PSAK. Hasil analisis kasus yang diungkap oleh Agape Anjumarito Panjaitan, dkk. (2025) mengenai manipulasi LKK pada PT Envy Technologies Indonesia Tbk (Tabel 1, No. 3) menunjukkan pertentangan fundamental antara praktik dan regulasi. Ulasan Keterkaitan dengan Konsep Dasar: Skandal manipulasi yang melibatkan *overstatement revenue* dan transaksi fiktif secara gamblang merupakan pelanggaran terhadap prinsip representasi jujur (*faithful representation*) dan substansi mengungguli bentuk (*substance over form*) yang menjadi landasan PSAK. Fenomena ini diperkuat oleh Teori Agensi, di mana konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan *stakeholder* (prinsipal) memicu tindakan manipulatif demi keuntungan pribadi atau untuk memenuhi target pasar. Implikasi Teoritis dan Terapan: Secara teoritis, kasus-kasus ini menyoroti bahwa kerangka PSAK, meskipun sempurna secara teknis, tetap tidak mampu sepenuhnya mencegah *fraud* jika tidak didukung oleh integritas etika dan sistem pengawasan eksternal yang efektif. Secara terapan, hasil ini berimplikasi mendalam pada perlunya penguatan Fungsi Audit: Auditor perlu mengadopsi teknik audit forensik yang lebih canggih untuk mendeteksi *earnings manipulation* yang terselubung di balik eliminasi konsolidasi yang kompleks.

Sanksi yang Deteren: Regulator (OJK) harus menerapkan sanksi yang lebih keras dan *deteren* (memiliki efek jera) sebagai mekanisme *cost-control* untuk menyeimbangkan *agency costs* yang timbul akibat manipulasi keuangan. Tanpa sanksi yang tegas, LKK akan terus rentan menjadi alat rekayasa.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa kerangka regulasi PSAK, yang terdiri dari PSAK 4, 22, 65, dan 110, telah membentuk fondasi teoretis yang kokoh, terbukti secara

signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) sesuai dengan tujuan Teori Entitas. Namun, melalui sintesis kritis literatur, ditemukan bahwa integritas LKK secara fundamental terancam oleh dua isu: kompleksitas teknis yang muncul dari konvergensi IFRS (terutama PSAK 22) yang berpotensi mengurangi daya banding global, dan yang paling mengkhawatirkan, risiko manipulasi laporan keuangan yang dipicu oleh konflik Teori Agensi. Sebagai respons kritis terhadap temuan ini, kepatuhan teknis saja tidaklah cukup; mutlak diperlukan penguatan ekosistem pengawasan dengan mendesak otoritas regulasi (OJK) untuk menerapkan sanksi yang bersifat deteren guna menciptakan efek jera yang nyata terhadap pelaku rekayasa laporan keuangan. Selain itu, profesi auditor harus secara proaktif mengadopsi teknik audit yang lebih canggih untuk mendeteksi *earnings manipulation* yang disamarkan dalam proses eliminasi konsolidasi yang kompleks. Kajian ini memiliki keterbatasan karena hanya berbasis pada *Systematic Literature Review* kualitatif yang mengandalkan data sekunder, sehingga generalisasi temuan empiris harus dilakukan dengan kehati-hatian. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi penelitian mendatang untuk melakukan pengujian kuantitatif terhadap efektivitas sanksi regulasi atau menguji dampak spesifik dari perbedaan perlakuan Kepentingan Non-Pengendali (NCI) pasca-konvergensi terhadap keputusan investasi.

LITERATUR REVIEW ENTITAS KONSOLIDASI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DALAM PERSPEKTIF STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, C. N., Mayasari, D., Hernawan, A. A., Ginting, C. S. B., & Gautama, B. A. (2024). Analisis perbedaan penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan di Indonesia dengan konvergensi IFRS dan PSAK 22. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 399–408.
- Ayuningtyas, N. P. W., Ngo, D., Katoni, H. N., Tanishia, J., Jesslyn, Selvia, & Sherly. (2024). Analisis implementasi PSAK 15, 22 dan 65 pada transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan konsolidasi perusahaan. *Fortunate Business Review*, 5(?).
- Diandra, P. K., Hasriyono, K. M., Kurnianingtyas, I., & Barbie, V. (2024). Analisis Perbandingan Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan PSAK 110. *Jurnal Lentera Akuntansi*.
- Lestari, S. A. M. P., Yorinda, V. E., Yulianto, D. G., Yance, E., & Oktaviani, N. L. (2024). Tantangan Akuntansi dan Keuangan dalam Konsolidasi Entitas dengan Struktur Keuangan yang Kompleks. JKPI.
- Mufida, A., Permatasari, D., Yolasa, R., & Pagiarti, E. K. (2025). Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan PSAK 4 pada PT Astra International Tbk. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan*.
- Mutiara, I., & Putri, N. A. (2025). Penerapan PSAK 22 Kombinasi Bisnis terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian. JAKPT.
- Panjaitan, A. A., Simamora, M., Siahaan, S. A., Nasution, P. W., Simbolon, J. A., & Siregar, T. R. S. (2025). Manipulasi laporan keuangan konsolidasi dalam entitas konsolidasi: Studi kasus PT Envy Technologies Indonesia Tbk. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 605–614.
- Pratiwi, N. A., Wardana, R. P., Maharani, S., & Panggiarti, E. K. (2023). Penerapan PSAK Nomor 65, PSAK Nomor 22, dan PSAK Nomor 4 pada laporan keuangan konsolidasi. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(3), 232–241.